UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN BPK RI Ke - 73

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin, 20 Januari 2020, melaksanakan upacara bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-73 BPK RI di halaman Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Inspektur Upacara Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Ade Iwan Ruswana S.E., M.M., Ak., CSFA, CA dan sebagai komandan upacara Suwito.

Upacara ini juga dihadiri oleh Para Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional serta pegawai lainnya. Dalam sambutan Inspektur Upacara membacakan Pidato Ketua BPK RI antara lain menjelaskan visi BPK 2020-2024 menjadi Lembaga Pemeriksa terpercaya yang mendorong pengelolan keuangan yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan bernegara. Selanjutnya menjelaskan Tema yang di usung dalam HUT BPK ke -73 adalah**"Bersatu padu, BPK maju"** Dengan semangat persatuan, setiap unit kerja didorong bersinergi untuk menghasilkan energi besar dalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas BPK kedepan. Melengkapi hal itu, BPK juga mengusung slogan dan paket program yang diberi judul "*accountability for All*" atau akuntabilitas untuk semua. Secara filosofis, slogan ini bermaksud memperluas makna akuntabilitas, dari bermakna sempit pada akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, diperluas menjadi nilai dan budaya yang ditumbuh kembangkan dalam sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebelum mengawali kegiatan Upacara Peringatan HUT BPK RI ke 73 terlebih dahulu dibacakan sejarah singkat berdirinya BPK RI. Selanjutnya, pengibaran bendera dilaksanakan oleh pasukan pengibar bendera (Paskibra) yang anggotanya adalah Tim CPNS BPK Perwakilan Kalimantan Tengah. Pengibaran bendera, dan pembacaan Pancasila dan UUD 1945, dalam upacara tersebut juga dilaksanakan pemberian penghargaan Satya Lencana Karya bagi pegawai serta pemberian penghargaan kepada Pegawai Teladan dengan 3 katagori Pegawai Penunjang, Pemeriksa dan PTT. Di penghujung upacara ditampilkan penampilan parade pasukan pengibar bendera yang terdiri dari Tim CPNS BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

DIKLAT PERENCANAAN PEMERIKSAAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (LKPD)

Sehubungan akan dilaksanakan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2019 di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah. Sub Bagian SDM bekerjasama dengan Badan Diklat PKN serta Biro TI BPK Pusat melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan LKPD dan SIAP LK, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dari tanggal, 20 – 24 Januari 2020, mulai Pukul 08.00-17.00 WIB.

Diklat dengan mengambil tema "Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Pemeriksaan Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)". Diklat diawali dengan Pembukaan oleh Kepala Perwakilan Bapak Ade Iwan Ruswana, yang didampingi Kepala Subauditorat Kalteng I dan Kepala Subauditorat Kalteng II. Dalam pengarahan Kepala Perwakilan menyampaikan pesan bahwa tindak lanjut LHP sebelumnya, yang berdampak terhadap opini harus diintegrasikan ke dalam LHP LKPD TA 2019, Serta dalam penyampaian LKPD unaudited harus disampaikan oleh kepala daerah. Diklat yang diikuti oleh tujuh puluh tiga orang pegawai sebelum diawali pelatihan para peserta wajib mengikuti Pre-test dan Post-test online oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pemeriksa Keuangan yang materinya berasal dari Pedoman Manajemen Pemeriksaan, FAQ LKPD 2019, PSAP, Panduan Pemeriksaan LKPD, dan Kebijakan Pemeriksaan LKPD TA 2019. Mengawali pelatihan diklat di hari pertama adalah pemaparan materi SIAP LK oleh Bapak Novis dari Biro TI BPK Pusat yang menyajikan tata cara Penggunaan aplikasi SIAP LK dan SIAP Banparpol serta keamanan data,dan back up data.

Adapun Tujuan dilaksanakan diklat ini ialah untuk memberikan pemahaman kepada para pemeriksa khususnya dibagian perencanaan pemeriksaan agar Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat berjalan secara efektif dan efisien. Dan manfaat lain bagi para pemeriksa juga akan mendapatkan Sertifikat diklat dan angka jam diklat.

ZIARAH ANGGOTA IV BPK RI KE MAKAM WAKIL KETUA BPK RI PERIODE 2004 – 2009

Salah satu rangkaian acara peringatan HUT BPK RI ke 73, pada hari Minggu, 12 Januari 2020 telah dilaksanakan kegiatan ziarah ke makam Wakil Ketua BPK RI periode 2004-2009, Almarhum Bapak H.Abdullah Zainie di Taman Pemakaman Umum (TPU) SKIP, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat. Acara tersebut dihadiri oleh Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ibu Isma Yatun yang didampingi oleh Staf Ahli Bidang Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan BPK RI, Bapak Edward G.H.Simanjuntak, Kepala Biro Setpim Ibu Diah serta Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Ade Iwan Ruswana. Pejabat Struktrural dan Pejabat Fungsional Pemeriksa serta beberapa pegawai turut hadir dalam acara tersebut. Adapun pimpinan daerah yang hadir yaitu Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Fahrizal Fitri, Bupati Kotawaringin Barat, Ibu Hj.Nurhidayah, Bupati lamandau, Bapak H.Hendra Lesmana, Bupati Sukamara, H.Windu Subagio, Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, dan para Kepala SKPD serta Keluarga Besar Almarhum H.Abdullah Zainie.

Dalam kegiatan ziarah ini Anggota IV Ibu Isma Yatun menyampaikan tentang ketokohan Alm. H.Abdullah Zainie yang patut diteladani adalah pribadi yang memiliki keunggulan secara ketokohan kelembagaan, kecerdasan berorganisasi, keunggulan dalam karakter, dan keunggulan dalam kepemimpinan.

SOSIALISASI PRISMA-APLIKASI PERENCANAAN STRATEGIS DAN MANAJEMEN KINERJA BPK

Bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Kamis, 16 Januari 2019 dilaksanakan sosialisasi Aplikasi PRISMA - Aplikasi Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja BPK. Sosialisasi dibuka dengan sambutan dari Kepala Sekretariat Perwakilan Dionisius Yudianto S.E., M.M. Kegiatan sosialisasi diikuti oleh seluruh pegawai baik PNS, CPNS, maupun PTT di lingkungan kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Tujuan dilaksanakan sosialisasi Aplikasi Prisma adalah untuk memberikan pemahaman kepada seluruh peserta mengenai mekanisme Penyusunan SKP melalui Aplikasi Prisma, antara lain Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai TA 2020 oleh seluruh pegawai BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah berbasis pada Aplikasi.

Adapun manfaat yang diperoleh peserta adalah pertama kemudahan dalam menyusun SKP , sedangkan user dalam hal ini Subag SDM dan pimpinan dapat memonitor pegawai yang sudah selesai atau belum dalam menyusun SKP.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah
TAHETA Edisi 1/2020

Ziarah Anggota IV BPK RI ke Makam Wakil Ketua BPK RI Periode 2004-2009
Sosialisasi PRISMA
Upacara Peringatan HUT BPK Ke 73
Diklat Perencanaan Pemeriksaan Dalam LKPD
Bhakti Sosial Dharma Wanita
Family Gathering Keluarga Besar BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah
Penyerahan LHP Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019
Pengambilan Sumpah Janji PNS
Tiga Pemerintah Kabupaten Menyerahkan LKPD Unaudited TA 2019
Pendampingan Sensus Online dan Pengisian SPT Melalui E-Filing
Penyerahan LKPD Unaudited TA 2019 &
Penyerahan LHP Banparpol

PENYERAHAN LKPD UNAUDITED TA 2019 DAN PENYERAHAN LHP ATAS PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BANPARPOL TA 2019

Selasa, 17 Maret 2020, pukul 14.00 WIB, bertempat di Auditorium, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima LKPD Unaudited TA 2019 dari 11 Pemerintah Daerah di Kalimantan Tengah yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya, Kab Kotawaringin Timur, Kab Seruyan, Kab Lamandau, Kab Gunung Mas, Kab Pulang Pisau, Kab Kapuas, Kab Murung Raya, Kab Kab Katingan, dan Kab Barito Selatan. Dalam kesempatan ini, Kepala Daerah atau yang mewakili secara langsung menyerahkan LKPD Unaudited TA 2019 kepada Kepala Perwakilan, Bpk, Ade Iwan Ruswana. Sehubungan dengan adanya wabah covid-19 maka acara penyerahan LK dan LHP diatas dihadiri secara terbatas hanya Kepala Daerah dan Ketua DPRD. Penyerahan LKPD Unaudited ini merupakan kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Perwakilan, Bpk. Ade Iwan Ruswana juga menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Banparpol TA 2019. Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Banparpol TA 2019 dilaksanakan berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Ade Iwan Ruswana menyampaikan beberapa hal diantaranya bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah semakin baik, transparan, dan akuntabel. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD TA 2018 pada hampir seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Namun BPK mengharapkan Pemerintah Daerah segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang masih ditemukan dalam pemeriksaan sebelumnya khususnya yang bisa berdampak pada penyajian Laporan Keuangan, seperti temuan terkait pengelolaan aset tetap, karena jika tidak segera ditindaklanjuti tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi opini, mengingat akumulasi nilainya dapat melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan.

Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan yang telah disampaikan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Laporan Hasil Pemeriksaan akan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah LKPD diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Kepala Perwakilan juga menyampaikan terkait hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran banparpol TA 2019. BPK telah melakukan pemeriksaan atas LPJ Banparpol TA 2019 sebanyak 154 partai politik se Provinsi Kalimantan Tengah, dengan kesimpulan atas pemeriksaan LPJ Banparpol TA 2019 sbb:

a. Sesuai kriteria, sebanyak 119 LPJ partai politik (77,27%);
b. Sesuai kriteria dengan pengecualian, sebanyak 30 LPJ partai politik (19,48%)
c. Tidak sesuai, sebanyak 5 LPJ partai politik (3,25%);
d. Tidak menyatakan kesimpulan, nihil.

BPK mengharapkan pada tahun-tahun mendatang pertanggungjawaban Banparpol semakin baik, tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu dituntut peran dari Badan Kesbangpol untuk melakukan pembinaan secara berkesinambungan kepada partai politik di wilayah masing-masing.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinisi Kalimantan Tengah
http://palangkaraya.bpk.go.id
Jalan Yos Sudarso 16 Palangka Raya

Redaksi

Penanggung Jawab	: Ade Iwan Ruswana
Redaktur	: Dionisius Yudianto
Editor	: Bambang Budi Purwanto
Web Admin	: Dica Surya Cardina
Web Developer	: Karunia Wibisono
Desain Grafis	: David Fernando Napitupulu
Fotografer	: Muys
Pembuat Arikel	: Artha Magdalena Sitanggang
Sekretariat	: Nurul Latifah

PENGAMBILAN SUMPAH PEGAWAI NEGERI SIPIL BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Hari Senin, 17 Februari 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pengambilan sumpah Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengambilan sumpah PNS ini dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan, Bapak. Ade Iwan Ruswana kepada 21 PNS sesuai dengan agama yang dianut masing-masing PNS dan disaksikan oleh para saksi, rohaniwan, dan para pejabat struktural. Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah PNS.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan membacakan sambutan Sekretaris Jenderal (Sekjen) BPK, yaitu menyampaikan bahwa UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah membawa perubahan dalam kehidupan karir PNS. Selama ini karir PNS dianggap sebagai "Zona Nyaman", namun sekarang berubah menjadi "Zona Kompetitif" sehingga akan dicapai kinerja Lembaga yang kualitasnya terus meningkat karena adanya kompetisi pegawai yang sehat dalam menunjukkan kinerja yang terbaik. Selain itu diharapkan PNS selalu menjaga nilai-nilai dasar BPK integritas, independensi, dan profesionalisme. PNS tidak merendahkan diri dan martabat dengan menjual prinsip dan melakukan hal yang mecederai kredibilitas PNS dan instansi serta merugikan negara.

TIGA PEMERINTAH KABUPATEN MENYERAHKAN LKPD UNAUDITED TA 2019

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk dilakukan pemeriksaan. Berkenaan dengan hal tersebut, pada hari Senin, 9 Maret 2020, pukul 14.00 WIB, bertempat di Auditorium, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah menerima LKPD Unaudited TA 2018 dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Timur, dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Ade Iwan Ruswana, menyampaikan bahwa ketiga Pemerintah Daerah tersebut telah memperoleh opini WTP selama tiga tahun berturut turut, yaitu LKPD TA 2016 s.d. 2018. BPK berharap Pemerintah Daerah telah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan sebelumnya, khususnya yang bisa berdampak pada penyajian laporan keuangan seperti temuan terkait pengelolaan aset tetap, karena jika tidak segera ditindaklanjuti, tidak menutup kemungkinan akan mempengaruhi opini, mengingat akumulasi nilainya dapat melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk dapat mempertahankan opini WTP yang selama ini sudah diraih.

Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah akan melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan yang disampaikan yang terdiri dari 7 (tujuh) jenis laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan penilaian atas kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), pengungkapan yang memadai, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI). Pemeriksaan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Laporan Hasil Pemeriksaan akan disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah LKPD diterima oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

PENDAMPINGAN SENSUS ONLINE & PENGISIAN SPT MELALUI E-FILING

Bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Selasa, 10 Maret 2020 dilaksanakan sosialisasi Sensus Penduduk oleh Badan Pusat Statistik Palangka Raya. Kegiatan sosialisasi dibuka dengan sambutan Kepala Perwakilan, Bapak Ade Iwan Rusawana, S.E., M.M., Ak., CFSA., CA. dan diikuti oleh seluruh pegawai baik PNS, CPNS, maupun PTT di lingkungan kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Tujuan dilaksanakan sosialisasi Sensus Penduduk oleh Badan Pusat Statistik Palangka Raya adalah untuk memberikan pemahaman kepada seluruh peserta mengenai mekanisme update Sensus Penduduk yang bisa dilakukan secara online melalui situs sensus.bps.go.id serta mekanisme pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filling* secara online di situs www.pajak.go.id dengan menggunakan akun SPT yang dimiliki oleh masing-masing pegawai. Adapun manfaat yang diperoleh peserta baik pegawai maupun para pejabat struktural adalah kemudahan dalam meng-*update* data keluarga dan dalam pelaporan SPT Tahunan.

BHAKTI SOSIAL DHARMA WANITA PERSATUAN BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DI PANTI ASUHAN AL MIM PALANGKARAYA

Pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020, Dharma Wanita Persatuan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan bhakti sosial ke Panti Asuhan Al Mim Palangka Raya. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun BPK RI ke 73 dan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengingatkan kita agar selalu berbagi kepada sesama manusia karena

sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sumbangan dikumpulkan dari para pegawai dan keluarga besar BPK Perwakilan Kalimantan Tengah.

Kunjungan ke Panti Asuhan Al Mim langsung dipimpin oleh Istri Kepala Perwakilan, Ibu Ade Iwan Ruswana dengan didampingi oleh beberapa anggota Dharma Wanita Persatuan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan pegawai. Sumbangan langsung diserahkan oleh Ibu Ade Iwan Ruswana kepada pengurus Panti Asuhan Al Mim yaitu berupa uang, sembako, dan pakaian layak pakai. Dalam sambutannya, Ibu Ade Iwan Ruswana menyampaikan acara seperti ini merupakan acara yang positif yang tentunya harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Kita dapat mentransfer nilai-nilai positif kepada sesama makhluk ciptaan Allah sehingga mereka lebih bersemangat dalam melaksanakan aktivitas.

FAMILY GATHERING KELUARGA BESAR BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun BPK RI ke 73, pada hari Sabtu 25 Januari 2020, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan family gathering yang bertempat di Muhammad Subuh Centre, Jl. Tjilik Riwut km 36,3 Palangka Raya. Kegiatan ini diikuti oleh para pegawai beserta keluarga.

Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Bpk. Ade Iwan Ruswana dengan pelepasan balon ke udara. Selanjutnya para pegawai mengikuti kegiatan tim building, sedangkan anak-anak didampingi oleh para ibu melaksanakan kegiatan outing berkeliling area Muhammad Subuh Center dan mengikuti beberapa *fun games* untuk anak.

Pada siang hari setelah ishoma, acara dilanjutkan dengan pembagian hadiah lomba, pengundian dan pembagian doorprize dan hadiah utama bagi seluruh peserta. Kegiatan ini diharapkan dapat mempererat rasa kekeluargaan dan membangun kebersamaan antar pegawai dan keluarga.

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019

Atas beberapa permasalahan tersebut, apabila tidak segera ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi, maka akan dapat mempengaruhi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu di masa yang akan datang.

Pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 pukul 14.00 WIB, bertempat di ruang VIP lantai 2 BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. LHP diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak. Ade Iwan Ruswana kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak. Harmain Ibrohim. Acara tersebut juga dihadiri oleh pejabat fungsional pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan jajaran dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 ini dilaksanakan pada KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan lima satker KPU Kabupaten/Kota yaitu KPU Kota Palangka Raya, KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, KPU Kabupaten Katingan, KPU Kabupaten Barito Timur, dan KPU Kabupaten Gunung Mas. Dalam sambutannya, Bapak. Ade Iwan Ruswana menyampaikan terdapat beberapa permasalahan pokok yang perlu mendapatkan perbaikan.